

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kinerja dalam arti luas merupakan suatu prestasi kerja atau hasil kerja seseorang berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dicapai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. Umumnya setiap organisasi sangat memperhatikan upaya pengoptimalan kinerja Sumber daya manusia (SDM). Sehingga dalam hal ini Sumber daya manusia menjadi faktor penentu bagi perusahaan untuk mencapai kinerja yang baik. Kinerja Sektor Publik adalah suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi publik dalam mencapai tujuan. Tuntutan yang tinggi pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah dan pengukuran kinerja tersebut mempunyai banyak tujuan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun kinerja yang baik tujuan. Tujuan yang telah dicapai nantinya akan dinilai sebagai bahan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan dimasa depan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian.

Pengukuran kinerja dalam instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolak ukur yang telah dibuat (standar minimum pelayanan publik). Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur menggunakan konsep value for money, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi organisasi bisnis mau organisasi sector publik. Pengukuran kinerja sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi periode lalu, periode sekarang dan periode yang akan datang, sehingga dapat diketahui kinerja mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Pengukuran kinerja juga sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Mardiasmo, 2002:121). Selama ini pengukuran kinerja umumnya hanya dilakukan secara tradisional. Pengukuran kinerja secara tradisional lebih menekankan kepada aspek finansial, padahal dalam mengukur kinerja suatu perusahaan tidak bisa hanya melihat dari sisi finansial, tetapi juga non finansial. Dengan hanya melihat ukuran-ukuran finansial saja tidak akan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan tidak dianggap baik jika hanya dilihat dari sisi keuangan saja karena dianggap tidak mampu mencerminkan kompleksitas dan nilai yang melekat dalam perusahaan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan ilmu manajemen, sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan cara tradisional dinilai banyak memiliki kelemahan dan keterbatasan. Hal ini mendorong Robert S. Kaplan (Guru Besar Akuntansi di Harvard Business School) dan David P. Norton (Presiden dari Renaissance Solutions, Inc.) untuk merancang suatu sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif yang disebut dengan *Value For Money*. Dimana sistem pengukuran ini menyediakan tujuan-tujuan strategis organisasi ke dalam seperangkat tolak ukur kinerja yang saling berhubungan. *Value For Money* tidak hanya memperhatikan kinerja finansial saja, tetapi juga kinerja non finansial. Aspek non finansial mendapat perhatian yang cukup serius karena pada dasarnya peningkatan kinerja finansial bersumber dari aspek non finansial, sehingga apabila perusahaan akan melakukan pelipatgandaan kinerja maka fokus perhatian perusahaan akan ditujukan kepada peningkatan kinerja non finansial. berkembang dengan baik.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Pada konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance* yaitu pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga konsep *value for money* ini sangat dibutuhkan sebagai pendukung pengelolaan keuangan daerah dan dana daerah. Untuk mendukung diberlakukannya pengelolaan dana publik yang berdasarkan *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang baik. Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa penerapan konsep *value for money* (VFM) penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Hal ini disebabkan karena implementasi konsep tersebut akan memberi manfaat untuk menilai efektifitas pelayanan publik, mutu pelayanan publik, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban public.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Pasal 1 PP Nomor 71 Tahun 2010) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (2), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka telah diputuskan oleh Pemerintah dengan menetapkan: peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap

anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi disemua pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (BUMD).

Sesuai gamaran di atas, penulis dapat mengemukakan dua peneliti terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Brayel Topan Tambariki, dengan Judul” Penggunaan Informasi Finansial Dalam Mengukur Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Puskesmas Bahu). Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : (a). Pada Tahun 2014, tingkat efektivitas di Puskesmas Bahu adalah tidak efektif yang berarti tingkat pencapaian hasil adalah tidak efektif. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan saat ini puskesmas tidak lagi memperoleh pendapatan dari masyarakat, maka tidak ada target pendapatan yang harus diterima puskesmas setiap tahunnya. Satu-satunya sumber pendapatan puskesmas adalah dari subsidi pemerintah, sehingga

subsidi yang diberikan pemerintah harus dihabiskan pada tahun tersebut. Karena setiap tahunnya anggaran dari pemerintah harus terealisasi sesuai dengan anggaran yang diterima, menyebabkan setiap tahunnya hasil perhitungan tingkat efektivitas adalah tidak efektif. b) Pada Tahun 2015, tingkat efektivitas di Puskesmas Bahu adalah tidak efektif yang berarti tingkat pencapaian hasil tidak efektif. c) Pada Tahun 2016, tingkat efektivitas di Puskesmas Bahu adalah tidak efektif yang berarti tingkat pencapaian hasil adalah tidak efektif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari, Tahun 2017. Dengan judul “ Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang) yang memperoleh hasil sebagai berikut : Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014 tidak ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomi lebih dari 100% yaitu 104.63%. Dari segi efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014 yaitu efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi 95.89%. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas tahun 2010-2014 yaitu 108.26% yang menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014 sangat efektif. 4. Purnama (2014). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kinerja organisasi publik belum sepenuhnya mengaplikasikan prinsip value for money yaitu efisien, efektif, dan ekonomis. Misalnya pengukuran kinerja di Pemda Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa kinerjanya cukup efisien dan ekonomis tetapi kurang efektif.

Dari kedua penelitian terdahulu di atas, pengukuran kinerja sektor publik perlu dilakukan dan salah satu cara untuk mengukur kinerja sektor public adalah melalui informasi finansialnya. Dalam konteks ini adalah laporan keuangan dengan menggunakan pengukuran *Value for Money*. Suatu organisasi dikatakan baik apabila laporan

keuangannya baik begitu juga dengan organisasi sector public meski merupakan perusahaan nirlaba tapi sistem dan tata kelola keuangannya harus benar-benar sesuai dengan standar. Salah satu organisasi sector publik yang merupakan target penelitian penulis adalah organisasi yang bergerak dalam kesehatan masyarakat (PUSKESMAS).

Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, harus memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Untuk memberikan pelayanan yang baik tentunya selalu diusahakan adanya peningkatan kualitas pelayanan guna mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Keberadaan Puskesmas sangat bermanfaat bagi keluarga tidak mampu. Dengan adanya puskesmas, setidaknya dapat menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang memadai yakni pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

Puskesmas yang menjadi objek penelitian penulis ini adalah Puskesmas Oesapa dimana Puskesmas ini baru berdiri pada tahun 2015. Puskesmas Oesapa ini jika ditinjau dari kinerjanya yang dapat diukur dari tingkat ekonomis, tingkat efisiensinya maupun tingkat efektivitas belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian kinerja agar kita dapat mengetahui gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serta managen puskesmas pada akhir tahun kegiatan dan sebagai masukan untuk rencana yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk mengangkat judul“**Analisis Kinerja Puskesmas Oesapa Berdasarkan Penggunaan Informasi Finansial Dengan Mengukurtingkat Ekonomis, Tingkat Efisiensi Dan Tingkat Efektifitas**”.

1.2.Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Analisis kinerja Puskesmas Oesapa berdasarkan penggunaan informasi finansial dengan mengukur tingkat ekonomis, tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas.

1.3.Persoalan Penelitian

Persoalan dari penelitian ini adalah Bagaimana kinerja Puskesmas Oesapa berdasarkan penggunaan informasi finansial dengan mengukur tingkat ekonomis, tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas ?.

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja puskesmas oesapa berdasarkan penggunaan informasi finansial dengan mengukur tingkat ekonomis, tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan metode value for money dalam mengukur kinerja organisasi sektor publik dan mampu memberikan masukan- masukan dan mendalami topik yang sama.
2. Manfaat Praktis, memberikan pengetahuan bidang akuntansi yang berguna mengenai Penggunaan Informasi Finansial dalam Mengukur Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Puskesmas Oesapa)

